

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sebagai subjek pembangunan penduduk perlu ditingkatkan kualitasnya dan sebagai objek pembangunan penduduk tersebut perlu dikendalikan jumlahnya. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2010 menurut IDB (International Data Base) Biro Sensus Amerika Serikat yaitu mencapai 6,952,939,682 jiwa. Pertambahan penduduk ini cenderung lebih besar terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Indonesia merupakan salah satu Negara sedang berkembang. Sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 234.2 juta jiwa (nasional.kompas.com).

Pertambahan penduduk yang lebih cepat tentu akan membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun dampak positif yaitu dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tenaga yang produktif untuk meningkatkan pendapatan, dalam arti bahwa jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan nasional yang diupayakan sebagai tenaga kerja. Dampak negatifnya apabila pertambahan penduduk tidak seimbang dengan tingkat produksi, jelas akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan berat pada sektor penyediaan pangan, sandang, perumahan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan dan sebagainya.

Pertambahan penduduk yang begitu pesat dengan sendirinya akan menuntut fasilitas yang baik dari segi kualitas maupun dari segi jumlah yang dapat menopang hidup manusia. Namun demikian pada kenyataannya pembangunan di Indonesia kurang mampu berpacu dengan pesatnya pertumbuhan penduduk sehingga pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan fasilitas yang dibutuhkan

Pertambahan penduduk menuntut adanya perkembangan pembangunan. Pertumbuhan penduduk tanpa disertai kontrol untuk mengatur jumlah perkembangan yang diinginkan hanya akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Adisasmita (2010) mengatakan kebutuhan atau permintaan tersedianya fasilitas perkotaan di beberapa daerah perkotaan dirasakan terlalu besar dibandingkan dengan yang dibangun. Suplai prasarana dan sarana perkotaan ternyata tidak mampu mengimbangi yang dibutuhkan sedangkan perkotaan berlangsung semakin pesat. Tidak seimbang fasilitas dibandingkan dengan kebutuhan, menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penggunaan atau pemakaian dari fasilitas yang tersedia, misalnya ketidاكلancaran pelayanan, hal ini jelas merugikan masyarakat.

Jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas pelayanan baik sosial dan ekonomi dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian pembangunan itu telah memberikan hasil bagi kehidupan penduduk, tetapi pembangunan itu belum merata di berbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial.

Permasalahan itu timbul disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, selama ini pola perencanaan pembangunan mengartikan makna partisipasi sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya serta kurangnya kesiapan masyarakat atau sumberdaya manusia padahal sumberdaya alam jumlahnya relatif besar, ini memerlukan pengelolaan yang lebih intensif agar mampu memiliki produktivitas yang tinggi (Junaedi, 1999).

Seiring dengan perjalanan dari waktu ke waktu, pada umumnya provinsi dan kabupaten/ kota mengalami pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk harus diimbangi dengan penyediaan berbagai fasilitas. Tampaknya keadaan itu tidak sebanding dan tidak jarang terjadi pada fasilitas pelayanan sosial yang mencakup fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, sanitasi, kesenian, olahraga, keagamaan dan fasilitas pelayanan keamanan (Muta'ali, 2000). Ketersediaan fasilitas pelayanan itu di setiap provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Kota Sibolga mengalami masalah yang sama.

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Sibolga tahun 2000 sebesar 81.710 jiwa dan tahun 2010 sebesar 94.316 jiwa. Keadaan ini menyebabkan jumlah penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial sehingga fasilitas pelayanan tidak mencukupi bagi kebutuhan penduduknya. Penduduk yang terus mengalami pertumbuhan tetapi tidak dibarengi jumlah fasilitas pelayanan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa tidak seluruh penduduk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan sosial.

Keadaan ini terlihat pada fasilitas pelayanan pendidikan terutama sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan jumlah 13 unit. Sesuai dengan rasio yakni satu SLTP per 4.800 penduduk, dengan jumlah penduduk 96.034, seharusnya membutuhkan 27 unit SLTP. Hal ini menunjukkan fasilitas pelayanan pendidikan yang tersedia masih jauh dari sesuai, yang masih membutuhkan 7 unit lagi. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka pembangunan akan semakin timpang pada fasilitas pelayanan penduduk. Hal ini juga diduga terjadi pada fasilitas pelayan sosial yang lain seperti kesehatan, dan olahraga dan rekreasi. Berhubungan dengan masalah ini, maka perlu dikaji ketersediaan dan kesesuaian fasilitas pelayanan sosial di Kota Sibolga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yang terkait dengan penambahan penduduk terhadap ketersediaan fasilitas pelayan sosial di Kota Sibolga yaitu penyebab penambahan penduduk, ketimpangan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas sosial mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, perumahan, kesenian, keagamaan dan fasilitas olahraga dan rekreasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu penambahan penduduk dan ketersediaan

fasilitas pelayanan sosial yang mencakup fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan fasilitas peribadatan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan) di Kota Sibolga tahun 2001-2010?
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan) di Kota Sibolga tahun 2001-2010?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perkembangan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan) di Kota Sibolga tahun 2001-2010?
2. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan) di Kota Sibolga tahun 2001-2010?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis
2. Sebagai referensi bagi penulis lain yang ingin membahas permasalahan yang sama dengan lokasi yang berbeda.
3. Menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam hal pengembangan pembangunan



THE
Character Building
UNIVERSITY